

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Siap Bahas KUA-PPAS Hingga Larut Malam

Kemendagri Kasih Batas 30 November 2019

Gambir, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya bila pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 dilakukan hingga larut malam.

Hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Jadwalkan ada di dewan, kami ikut saja. Mau siang dan malam, mau berapa hari silakan saja dibahas," kata Saefullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Kamis (24/10). Saefullah mengingatkan kepada legislator untuk bekerja

maksimal dalam membahas KUA-PPAS. Apalagi Kemendagri memberikan surat edaran bahwa pembahasan mengenai APBD 2020 harus rampung pada 30 November 2019.

"Setelah dokumen selesai, akan kami serahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi selama 15 hari dan ada waktu tujuh hari lagi. Sisanya persiapan kami supaya 1 Januari anggaran sudah berjalan dengan baik," ujar Saefullah.

Saefullah menambahkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 memang terjadi penurunan dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun. Kata dia, penurunan nilai anggaran ini merupakan hal yang biasa, apalagi DKI bisa menjelaskan persoalan itu kepada legislatif.

"Persoalan (penurunan) itu karena dana bagi hasil peme-

rintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta tidak tersetorkan. Sebesar Rp 6,39 triliun itu tidak disetorkan dan menjadi piutang pemerintah pusat yang kemudian dibayarkan pada 2020," katanya.

Menurutnya, dokumen yang diberikan eksekutif kepada legislatif saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DKI pada Rabu (23/10/2019) masih dibahas oleh dewan. Rencananya pembahasan mengenai anggaran ini akan kembali digulir pada Senin (28/10) bersama komisi-komisi di DPRD DKI. (faf)

Situasi Ekonomi Nasional

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai revisi dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020 yang dilakukan eksekutif sudah tepat. Hal ini berkaca pada situasi ekonomi nasional yang terjadi di Ibu Kota DKI Jakarta.

"Revisi itu turun karena situasi ekonomi. Jadi kalau nilainya naik, malah kami tanya karena seolah-olah tidak paham soal keadaan ekonomi. Makanya itu diturunkan nilainya," kata Taufik, (24/10).

Disebutkan, nilai KUA-PPAS ABDP 2020

turun dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun. Taufik mengatakan, hingga kini legislatif masih memeriksa rancangan KUA-PPAS 2020 yang diusulkan oleh eksekutif. Dokumen itu nantinya akan dibahas dengan komisi-komisi yang ada di DPRD DKI, kemudian akan dibahas kembali bersama eksekutif dalam rapat Banggar.

"Setelah itu pekan depannya akan ada penandatanganan MoU antara eksekutif dengan legislatif. Setelah itu baru pembahasan APBD 2020, insyaallah 30 November 2019 sudah selesai," ujar Taufik. (faf)